

**PENGARUH AKSES MODAL DAN AKSES PENDIDIKAN TERHADAP  
DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
(S1) pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri  
Padang*



Oleh :

**DIANA HUTAMI PUTRI**

**NIM/BP :15053005/2015**

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2019**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH AKSES MODAL DAN AKSES PENDIDIKAN TERHADAP  
DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

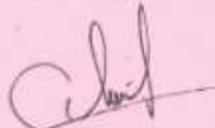
Nama : Diana Hutami Putri  
BP/NIM : 2015/15053005  
Keahlian : Ekonomi Koperasi  
Jurusan : Pendidikan Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi

Disetujui Oleh,

Padang, Agustus 2019

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi

Pembimbing



Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd  
NIP. 19820311 200501 2 005



Dr. Yulhendri, S.Pd, M.Si  
NIP. 19770525 200501 1 005

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

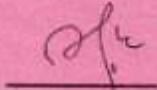
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH AKSES MODAL DAN AKSES PENDIDIKAN TERHADAP  
DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Diana Hutami Putri  
Bp/ NIM : 2015/15053005  
Jurusan : Pendidikan Ekonomi  
Konsentrasi : Ekonomi Koperasi  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2019

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Dr.Yulhendri, S.Pd, M.Si	
2.	Anggota	Elvi Rahmi, S.Pd, M.Pd	
3.	Anggota	Menik Kurnia Siwi, S.Pd, M.Pd	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Hutami Putri

Nim/Tahun Masuk : 15053005/2015

Tempat/Tanggal Lahir: Pekanbaru, 03 Juli 1997

Jurusan/Keahlian : Pendidikan Ekonomi/Ekonomi Koperasi

Fakultas : Ekonomi

Judul Skripsi : Pengaruh Akses Modal dan Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan di Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun Program Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Agustus 2019

Yang menyatakan



Diana Hutami Putri  
NIM. 15053005

## **ABSTRAK**

**Diana Hutami Putri 2015/15053005: Pengaruh Akses Modal dan Akses Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan di Provinsi Sumatera Barat.**

**Pembimbing: Dr. Yulhendri, S.pd, M.Si**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui (1) pengaruh akses modal terhadap distribusi pendapatan, (2) pengaruh Akses pendidikan terhadap distribusi pendapatan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan asosiatif. Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah provinsi Sumatera Barat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio Gini Sumatera Barat, akses terhadap modal (pinjaman) dan pendidikan (anggaran). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan data dari lembaga terkait, yaitu BPS Provinsi Sumatera Barat dan perpustakaan yang digunakan sebagai pendukung. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis regresi linier berganda. Uji prasyarat dilakukan dengan uji chow, uji hausman dan uji LM. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa (1) akses modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan. (2) pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan.

**Kata kunci: Akses Modal, Pendidikan, Pendapatan Distribusi**

## KATA PENGANTAR



Pujisyukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa sholawat beserta salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita semua memperoleh syafaatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Pengaruh Akses Modal dan Akses Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan di Provinsi Sumatera Barat**”

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Pendidikan Ekonomi. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan hingga jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini penulis sangat membutuhkan masukan kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurna skripsi ini.

Ucapan terimakasih teristimewa penulis sampaikan kepada kedua orang tua, bapak Husin dan ibu Nurlela S.Pd yang tidak pernah bosan memberikan do’a, dukungan moril, materil, motivasi, dan arahan demi kelancaran penulisan skripsi ini. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada adek-adekku Dwiya Ramadhanti dan Naila Rafifah yang selalu memberikan semangat dan dukungan materil kepada penulis. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada sahabat ku Yuvi Annisa yang

selalu menjadi pendengar setia, dan selalu memberikan semangat dan motivasi ketika penulis mengalami hambatan-hambatan ketika sedang menulis skripsi.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan yang sangat banyak dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Yulhendri, S.Pd, M.Si, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, arahan, serta waktu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Indris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Ibu Elvi Rahmi, S.Pd, M.Pd selaku Sektretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Tri Kurniawati S.Pd, M.Pd selaku penguji I.
4. Ibu Menik Kurnia Siwi S.Pd, M.Pd selaku penguji II.
5. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi ini.
6. Teman-teman angkatan 2015 yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah.Swt

Padang, Agustus 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Pembatasan Masalah .....	13
D. Perumusan Masalah .....	13
E. Tujuan Masalah.....	14
F. Manfaat Penelitian .....	14

### **BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

A. Kajian Teori .....	15
1. Ketimpangan Pendapatan .....	15
2. Akses Modal.....	22
3. Akses Pendidikan .....	24
B. Penelitian Relevan .....	26
C. Kerangka Konseptual.....	27
D. Hipotesis .....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	31
B. Objek Penelitian.....	31
C. Jenis Dan Sumber Data.....	31

D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Variabel Penelitian.....	32
F. Defenisi Operasional.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
1. Analisis Deskriptif.....	33
2. Analisis Induktif.....	33
H. Pengujian Hipotesis .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Penelitian.....	46
1. Kondisi Geografis .....	46
2. Jumlah Penduduk .....	47
B. Deskriptif Variabel Penelitian.....	48
1. Definisi Ketimpangan Distribusi Pendapatan .....	48
2. Deskripsi Akses Modal .....	51
3. Deskripsi Pendidikan.....	59
C. Analisis Induktif .....	61
1. Metode Estimasi Model Regresi Panel .....	62
2. Uji Pemilihan Model Data Panel .....	64
3. Pemilihan Model yang Tepat .....	67
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	69
1. Pengaruh Akses Modal Terhadap Distribusi Pendapatan.....	69
2. Pengaruh Akses Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan.....	72
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 1. Rasio Gini Sumatera Barat tahun 2014-2018 .....</b>	<b>3</b>
<b>Tabel 2. Data Anggaran Pendidikan Prov. Sumatera Barat (dalam rupiah).....</b>	<b>7</b>
<b>Tabel 3. Akses Modal (pinjaman) Sumatera Barat tahun 2014-2018 (dalam rupiah).....</b>	<b>10</b>
<b>Tabel 4. Rasio Gini Sumatera Barat Tahun 2014-2018 (data olah) .....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel 5. Pinjaman Yang Diberikan (dalam rupiah).....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel 6. Data Anggaran Pendidikan Prov. Sumatera Barat (dalam rupiah).....</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 7. Hasil Estimasi Common effect model.....</b>	<b>62</b>
<b>Tabel 8. Hasil Estimasi Fixed effect model .....</b>	<b>62</b>
<b>Tabel 9. Langrange Multiplier .....</b>	<b>63</b>
<b>Tabel 10. Hasil pemilihan Chow-test.....</b>	<b>64</b>
<b>Tabel 11. Hasil pemilihan Hausman .....</b>	<b>65</b>
<b>Tabel 12. Hasil pemilihan LM .....</b>	<b>66</b>
<b>Tabel 13. Hasil pemilihan REM.....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 1.kurva lorenz .....</b>	<b>20</b>
<b>Gambar 1. Kerangka konseptual .....</b>	<b>29</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
<b>Lampiran 1. Hasil olah data.....</b>	<b>85</b>
<b>Lampiran 2. Data Olah Akses Modal.....</b>	<b>86</b>
<b>Lampiran 3. Data Olah Anggaran Pendidikan .....</b>	<b>89</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara individu yang paling kaya dengan individu yang paling miskin. Semakin besar jurang pendapatan semakin besar variasi distribusi pendapatan. Jika keseimbangan terus terjadi antara kelompok kaya dan miskin, maka perekonomian tersebut menggambarkan pertumbuhan yang tidak merata.

Gustafsson dan Johansson (1999) menemukan hubungan negatif bagi negara maju antara persentase penduduk usia 65 dan di atas dan ketimpangan pendapatan. Kuznets (1955) menunjukkan dalam hipotesisnya bahwa ada ketimpangan wilayah urban-rural pada tahap awal pembangunan. Selama industrialisasi migrasi dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian dan perkotaan dapat menyebabkan kelompok-kelompok berpenghasilan rendah meningkat, menyebabkan meningkatnya kesenjangan kota dan desa.

Selain urbanisasi dan dependensi rasio, Stewart (2000) mengungkapkan upah minimum berpengaruh terhadap distribusi pendapatan di beberapa negara. Pertanyaan tentang dampak upah minimum terhadap distribusi pendapatan dan kemiskinan masih menjadi kontroversi. Teori neo-klasik mengungkapkan bahwa kenaikan upah minimum akan mengurangi tenaga kerja, pengangguran bertambah yang pada akhirnya akan berdampak padameningkatnya kemiskinan dan ketimpangan. Tapi

Keynesian (dan lainnya) rekening penentuan pekerjaan menantang kesimpulan ini (Stewart, 2000).

Kaldor (1956) menyatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi akan diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sedangkan distribusi pendapatan yang lebih merata akan diiringi oleh pertumbuhan ekonomi yang rendah (Boediono, 1982; 85). Todaro (2006) mengungkapkan kesenjangan pendapatan antar sektor industri modern dengan sektor pertanian tradisional pada awalnya akan melebar dengan cepat sebelum pada akhirnya menyempit kembali. Ketimpangan dalam sektor modern yang tengah mengalami pertumbuhan pesat itu sendiri jauh lebih besar daripada yang terkandung dalam sektor tradisional yang relatif stagnan ataupun konstan. Selain itu, pada tahap ini, langkah-langkah transfer pendapatan dan pengeluaran dalam rangka mengurangi kemiskinan belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah sehubungan dengan begitu rendahnya tingkat penghasilan yang rendah.

Masalah besar umum yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan kelompok masyarakat yang terendah serta jumlah masyarakat yang dibawah garis kemiskinan. Distribusi pendapatan memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan yang diterima oleh individu atau perorangan termasuk pula rumah tangga. Sehingga timpang atau tidaknya pendapatan daerah dapat diukur melalui distribusi penerimaan pendapatan antar golongan masyarakat ataupun antar wilayah. Koefisien Gini Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur dengan indeks gini atau ratio gini. Berikut kondisi gini ratio Sumatera Barat lima tahun terakhir 2014-2018.

**Tabel 1 Rasio Gini Sumatera Barat tahun 2014-2018**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>TAHUN</b>				
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Sumatera Barat	0,32	0,34	0,33	0,32	0,32
Kab.Kep.Mentawai	0,31	0,28	0,31	0,32	0,31
Kab.Pesisir Selatan	0,29	0,28	0,27	0,3	0,26
Kab.Solok	0,25	0,29	0,31	0,29	0,3
Kab.Sijunjung	0,32	0,29	0,33	0,33	0,3
Kab.Tanah Datar	0,26	0,33	0,3	0,26	0,29
Kab.Padang Pariaman	0,29	0,3	0,26	0,28	0,3
Kab.Agam	0,27	0,31	0,29	0,28	0,26
Kab.Lima Puluh Kota	0,24	0,33	0,27	0,26	0,28
Kab.Pasaman	0,26	0,3	0,3	0,26	0,27
Kab.Solok Selatan	0,29	0,38	0,31	0,3	0,31
Kab.Dharmasraya	0,32	0,36	0,3	0,25	0,26
Kab.Pasaman Barat	0,26	0,29	0,31	0,29	0,29
Kota Padang	0,33	0,35	0,35	0,34	0,34
Kota Solok	0,3	0,34	0,34	0,3	0,3
Kota Sawahlunto	0,35	0,33	0,32	0,3	0,31
Kota Padang Panjang	0,37	0,37	0,38	0,3	0,29
Kota Bukittinggi	0,34	0,34	0,33	0,31	0,34
Kota Payakumbuh	0,31	0,37	0,34	0,3	0,3
Kota Pariaman	0,3	0,33	0,34	0,3	0,32

(sumber: BPS Sumatera Barat 2018)

Berdasarkan data diatas dapat terlihat rata-rata indeks gini atau ratio gini Sumatera Barat berkisar antara 0,32- 0,34. Berdasarkan cara menghitungnya, indeks gini yang berkisar antara  $0.3 \leq G \leq 0,5$  merupakan ketimpangan sedang dan perlu diperhatikan agar tidak semakin melebar. Karena pemerataan pendapatan adalah tujuan dari pembangunan ekonomi. Selain itu, Adanya ketimpangan yang mencolok antar berbagai daerah (inter-regional disparity).Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan yang sangat berbeda antar daerah satu dengan lainnya. Ditinjau dari proporsinya, tingkatkesenjangan dapat dilihat pula dari perbedaan angka indeks pembangunan manusia yang mencolok antar daerah, termasuk antar perkotaan dan perdesaan.

Ketimpangan antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat daerah maju (*Developed Region*) dan daerah terbelakang (*Underdeveloped Region*) (Sjafrizal, 2012).

Menurut Kuncoro (2006), ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (*Endowment Factor*). Perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda,

sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2010).

Ketimpangan antar wilayah dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya mengenai Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Hipotesa ini kemudian lebih dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2012).

Menurut Hipotesa Neo-Klasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung mengalami peningkatan. Proses ini akan terus terjadi hingga ketimpangan mencapai titik puncak. Kemudian, bila proses pembangunan berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan mengalami penurunan. Berdasarkan hipotesa ini, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi umumnya pada negara-negara sedang berkembang, dan akan terjadi sebaliknya pada negaranegara maju. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah berbentuk huruf U terbalik.

Kebenaran Hipotesa Neo-Klasik ini diuji kebenarannya oleh Williamson (1966) melalui studi mengenai ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang menggunakan data time series dan cross section. Hasilnya menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak langsung

dapat menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah, akan tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya (Sjafrizal, 2012).

Simon Kuznet (1955) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan mengalami peningkatan. Observasi inilah yang kemudian, dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik”, karena perubahan longitudinal (time-series) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznet dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern.

Pada era ekonomi daerah saat ini, pembangunan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dimana kondisi dan potensi dari setiap daerah merupakan suatu modal dasar dan faktor dominan yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran dan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu pemerintah daerah perlu langkah strategi dalam pelaksanaan pembangunan dan juga dibutuhkan seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya pemerintah daerah berperan lebih dalam pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

Modal manusia seperti pendidikan juga berguna untuk meningkatkan pembangunan di Sumatera Barat. Namun yang terjadi saat ini adalah rata-rata lama bersekolah cukup terbilang rendah yang disebabkan karena tidak adanya pendidikan berkarakter dan pemerataan pendidikan. Fakta yang terjadi saat ini adalah pendidikan

tidak merata kesetiap daerah dikarenakan ketidakmerataan akses terutama ke fasilitas pendidikan yang menjadi penyebab makin meningkatnya kesenjangan pendapatan sehingga golongan menengah ke atas dianggap mampu memilih jenis pendidikan yang lebih dibandingkan masyarakat menengah kebawah. Dalam jangka panjang, peningkatan produktivitas pekerja dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas pendidikan, pelatihan dan kesehatan yang memadai. Pada saat ini dapat dilihat juga ketimpangan berfluktuasi sedangkan ketimpangan pendidikan naik. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesejahteraan guru sebagai tenaga pendidik.

**Tabel 2 Data Anggaran Pendidikan Prov. Sumatera Barat(dalam rupiah)**

NO	NAMA DAERAH	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	PROV.SUMTERA BARAT	40.822	51.886	35.838.514
2	KAB. LIMAPULUH KOTA	102.117	9.490	10.577.714
3	KAB. AGAM	17.100	13.052	24.266.959
4	KAB. KEPUALUAN MENTAWAI	9.046	10.714	9.023.643
5	KAB. PADANG PARIAMAN	10.176	10.257	63.517.148
6	KAB. PASAMAN	6.325	7.553	6.838.842
7	KAB. PESISIR SELATAN	7.079	12.634	23.277.485
8	KAB. SIJUNJUNG	3.038	7.828	8.540.683
9	KAB.SOLOK	6.017	6.691	12.650.348
10	KAB. TANAH DATAR	5.170	6.852	19.443.638
11	KOTA BUKIT TINGGI	1.820	2.599	8.012.983
12	KOTA PADANG PAJANG	6.385	3.470	5.321.044
13	KOTA PADANG	13.233	23.918	37.381.771
14	KOTA PAYAKUMBUH	1.170	5.496	30.690.517
15	KOTA SAWAH LUNTO	17.955	6.108	8.163.912
16	KOTA SOLOK	1.645	4.261	623.673
17	KOTA PARIAMAN	5.315	2.448	4.391.342
18	KAB. PASAMAN BARAT	5.882	9.253	15.576.522
19	KAB. DHARMASRAYA	5.041	11.820	35.806.434
20	KAB.SOLOK SELATAN	5.772	11.820	16.109.553

(sumber: DJPK KEMENKEU 2019)

Berdasarkan tabel 2 terlihat untuk anggaran pendidikan dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan. Terlihat dari anggaran pendidikan prov.sumatera barat tahun 2017-2018 mengalami kenaikan yang drastis pada tahun 2019, sedangkan untuk kabupaten kota juga mengalamin kenaikan yg drastis di tahun 2019 artinya anggaran pendidikan yang diberikan oleh pemeintah dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan karena semakin besar anggaran pendidikan yang diberikan semakin banyak bantuan atau dana terhadap pendidikan tersebut. Peran pemerintah diperlukan untuk mewujudkan jangka panjang SDM yang berkualitas. Jika dunia pendidikan suatu bangsa tidak dapat berkembang dengan baik maka pembangunan akan terganggu. Karena, pendidikan menyangkut pembangunan karakter sekaligus jati diri suatu bangsa. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur dan jenjang pendidikan bagi semua penduduk secara adil tanpa membeda-bedakan.

Permasalahan ketimpangan pendidikan akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat. Sejumlah hasil studi yang telah meneliti hubungan antara ketimpangan pendidikan dan ketimpangan pendapatan, menurut Psacharopoulos dan Woodhall (1985) pendidikan dan ketimpangan pendapatan dinegara-negara maju memiliki hubungan yang erat. Hal ini diperkuat oleh Becker dan Chiswick (1966) yang menunjukkan bahwa di seluruh wilayah di Amerika Serikat, ketimpangan pendidikan berkorelasi positif dengan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendidikan juga akan mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian Digdowiseiso (2009).

Selain pendidikan yang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, akses modal juga berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Menurut, Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Listyawan Ardi Nugraha (2011:9) “modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan”. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Yang menjadi persoalan di sini bukanlah penting tidaknya modal, karena keberadaannya memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar (Amirullah, 2005:7). Akses modal merupakan faktor yang penting dalam distribusi pendapatan, untuk mengetahui timpang atau tidaknya distribusi pendapatan tersebut maka akses modal merupakan salah satunya. Akses modal disini melihat seberapa besar modal kerja, investasi dan konsumsi yang dikucurkan oleh pihak bank kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Untuk melihat berapa kisaran akses modal tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini.

**Tabel 3 Pinjaman Yang Diberikan tahun 2014-2019 (dalam rupiah)**

INDIKATOR	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. KAB. AGAM	2.776.105	4.433.907	5.454.357	5.896.894	4.277.026
Modal Kerja	1.059.394	1.122.765	1.165.409	1.098.608	1.148.739
Investasi	773.067	2.426.357	3.349.546	3.816.801	2.137.646
Konsumsi	943.644	884.785	939.402	982.485	990.641
2. KAB. PASAMAN	2.264.792	2.177.176	2.281.109	2.425.725	2.292.615
Modal Kerja	969.592	933.104	1.002.259	1.036.886	992.880
Investasi	442.334	285.566	266.103	351.935	232.010
Konsumsi	852.865	958.506	1.012.746	1.036.904	1.067.724
3. KAB. LIMAPULUH KOTO	1.715.548	1.723.506	1.842.613	1.940.603	1.938.822
Modal Kerja	8.821.163	787.059	793.146	828.029	855.550
Investasi	111.357	105.293	122.480	124.233	119.101
Konsumsi	722.029	831.154	926.987	988.340	964.171
4. KAB. SOLOK SELATAN	1.106.879	1.198.582	1.225.894	1.254.169	1.366.106
Modal Kerja	380.684	399.486	408.030	398.341	506.495
Investasi	203.450	163.138	135.096	124.568	127.715
Konsumsi	522.744	635.958	682.796	731.261	731.897
5. KAB. PADANG PARIAMAN	1.754.041	2.114.137	2.173.093	2.451.070	2.009.903
Modal Kerja	557.978	563.025	566.978	610.300	700.901
Investasi	114.133	386.328	371.840	634.430	101.268
Konsumsi	1.081.931	1.164.784	1.234.274	1.206.340	1.207.734
6. KAB. PESISIR SELATAN	2.565.129	2.753.840	3.226.686	3.424.454	4.328.407
Modal Kerja	798.225	852.534	909.188	1.034.968	1.227.979
Investasi	555.422	495.926	794.810	721.771	1.319.914
Konsumsi	1.211.483	1.405.380	1.522.688	1.667.714	1.780.514
7. KAB. TANAH DATAR	1.529.678	1.757.925	1.904.248	2.028.439	2.211.714
Modal Kerja	598.814	684.850	757.814	821.163	959.478
Investasi	94.614	105.940	128.395	138.117	121.353
Konsumsi	836.250	967.135	1.018.039	1.069.159	1.130.883
8. KAB. SAWAH LUNTO/SIJUNJUNG	1.905.816	1.904.759	1.891.543	1.955.855	1.958.592
Modal Kerja	755.713	728.961	702.861	696.244	708.740
Investasi	308.848	250.439	230.080	265.170	229.084
Konsumsi	841.255	925.359	958.603	994.442	1.020.767
9. KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	219.827	270.022	300.572	324.138	360.267
Modal Kerja	48.727	61.769	63.031	61.841	77.150
Investasi	4.186	5.464	5.320	3.940	3.491
Konsumsi	166.914	202.789	232.221	258.357	279.626

INDIKATOR	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
10. KAB. PASAMAN BARAT	1.549.116	1.871.986	1.995.896	2.211.254	2.603.972
Modal Kerja	510.734	624.364	635.462	706.929	978.167
Investasi	272.041	377.295	392.708	434.256	450.312
Konsumsi	766.340	870.327	967.726	1.070.069	1.175.492
11. KAB. DHAMASRAYA	1.254.337	1.503.972	1.628.371	1.970.393	2.134.774
Modal Kerja	373.815	474.358	500.973	568.300	671.623
Investasi	325.731	396.818	436.867	613.365	592.096
Konsumsi	554.792	632.796	690.531	788.728	871.056
12. KAB. SOLOK	1.132.916	1.358.320	1.486.819	1.679.292	1.938.576
Modal Kerja	282.622	397.722	431.233	490.493	633.829
Investasi	69.296	78.431	87.727	75.315	83.765
Konsumsi	780.999	882.166	967.859	1.113.484	1.220.982
13. KOTA BUKIT TINGGI	2.817.190	2.889.535	2.981.921	3.145.666	3.443.354
Modal Kerja	1.407.281	1.359.611	1.361.097	1.285.934	1.480.522
Investasi	293.916	352.585	336.873	473.092	494.792
Konsumsi	1.115.993	1.177.339	1.283.951	1.386.640	1.468.040
14. KOTA PADANG	14.962.490	16.344.805	16.529.169	17.370.582	18.120.195
Modal Kerja	5.985.770	5.978.540	5.946.626	6.409.905	6.795.505
Investasi	2.904.724	3.774.171	3.406.031	3.041.515	2.857.141
Konsumsi	6.071.995	6.592.094	7.176.513	7.919.163	8.467.550
15. KOTA SAWAHLUNTO	465.685	530.202	564.444	644.088	719.416
Modal Kerja	121.722	122.914	121.838	178.110	212.219
Investasi	39.815	43.503	40.043	36.102	46.935
Konsumsi	304.152	363.784	402.564	429.876	460.262
16. KOTA PADANG PANJANG	605.627	658.850	726.135	751.358	772.028
Modal Kerja	192.824	215.123	231.494	235.380	247.294
Investasi	36.329	35.976	49.426	51.100	50.856
Konsumsi	376.474	407.751	445.216	464.878	473.878
17. KOTA SOLOK	1.275.867	1.356.379	1.430.542	1.561.020	1.633.183
Modal Kerja	336.491	355.947	365.282	411.219	400.813
Investasi	61.200	153.255	152.982	173.845	208.558
Konsumsi	878.176	847.177	912.277	975.956	1.023.812

INDIKATOR	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
18. KOTA PAYAKUMBUH	1.680.456	1.651.252	1.722.325	1.842.140	2.041.701
Modal Kerja	650.480	597.637	613.032	679.744	719.020
Investasi	124.437	148.463	161.832	154.114	173.883
Konsumsi	905.539	905.152	947.461	1.008.281	1.148.798
19. KOTA PARIAMAN	659.563	772.732	876.257	1.026.828	1.224.044
Modal Kerja	182.043	216.882	233.854	218.651	242.392
Investasi	28.945	31.229	36.746	33.083	37.324
Konsumsi	448.576	524.682	605.657	775.094	944.328
20. SUMATERA BARAT	42.241.064	47.271.885	50.241.992	53.903.968	55.374.695
Modal Kerja	16.095.073	16.476.591	16.809.606	17.771.045	19.559.296
Investasi	6.763.841	9.616.176	10.504.904	11.266.752	9.387.245
Konsumsi	19.382.150	21.179.118	22.927.482	24.866.171	26.428.155

(Sumber:SEKDA BANK INDONESIA SUMATERA BARAT 2019-2014)

Berdasarkan Tabel 3 pinjaman yang diberikan untuk modal kerja ,investasi dan konsumsi juga mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai dengan 2018 utk Provinsi Sumatera Barat, sedangkan untuk kabupaten kota sama hal nya dengan provinsi Sumatera Barat juga mengalami kenaikan setiap tahunnya akan tetapi pinjaman yang diberikan untuk kabupaten kota di provinsi Sumatera Barat mulai dari modal kerja ,investasi dan konsumsi memiliki porsi yang berbeda. Meskipun demikian dengan adanya pinjaman tersebut dapat mengurangi tingkat ketimpangan distribusi di Sumatera Barat.

Menurut Bambang Riyanto (1997:19) pengertian modal usaha sebagai ikhtisar neraca suatu perusahaan yang menggunakan modal konkrit dan modal abstrak. Modal konkrit dimaksudkan sebagai modal aktif sedangkan modal abstrak dimaksudkan sebagai modal pasif.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa modal usaha adalah harta yang dimiliki untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh laba yang optimal sehingga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisa sejauh mana ketimpangan antar wilayah (Region Disparity) yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk skripsi dengan judul **”PENGARUH AKSES MODAL DAN AKSES PENDIDIKAN TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis melakukan identifikasi masalah diantaranya:

1. akses modal melihat dari modal kerja investasi dan konsumsi
2. akses pendidikan melihat pada data anggaran sektor pendidikan

#### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan membatasi masalah yaitu **PENGARUH AKSES MODAL DAN AKSES PENDIDIKAN TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT.**

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka disajikan rumusan masalah:

1. Bagaimana pengaruh akses modal terhadap Distribusi Pendapatan yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat ?.

2. Bagaimana pengaruh akses pendidikan terhadap Distribusi Pendapatan yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat ?
3. Bagaimana pengaruh akses modal dan akses pendidikan terhadap Distribusi Pendapatan di Provinsi Sumatera Barat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap Distribusi Pendapatan di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah kredit mikro terhadap Distribusi Pendapatan di Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan jumlah kredit mikro Distribusi Pendapatan di Sumatera Barat.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah mengenai distribusi pendapatan di Sumatera Barat
2. Sebagai referensi bagi yang ingin memperdalam masalah ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat